

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONPLIK
MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN MINIMARKET DI
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diusulkan oleh:

ABD. KADIR S

NomorStambuk : 105640135811



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONPLIK
MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN MINIMARKET DI
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ABD. KADIR S

Nomor Stambuk : 105 64 01358 11

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Masyarakat Terhadap Pembangunan Mini Market Di Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Abd. Kadir S

Nomor Stambuk : 105 64 01358 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

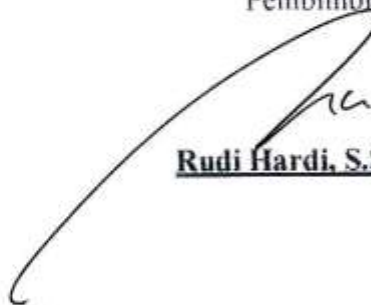
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si


Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



F. H. Ikvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



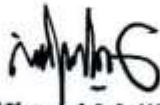
Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Peneliti Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dakan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1219/FSP/A.I-VIII/VIII?39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis Tanggal 11, Agustus 2018

TIM PENILAI

Ketua



Dr.Hjihyani Malik, S.Sos,M.Si

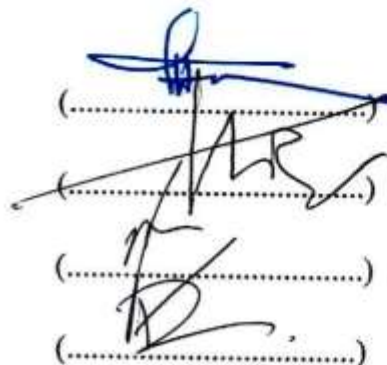
Sekretaris



Dr. Burhanuddin,S.Sos,M.Si

Penguji

1. Jaelan Usman, M.Si
2. Dra., Hj. St. Nurmaeta, MM
3. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si
4. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

ABD. KADIR S, 2017. *Strategi Pemerintah Dalam Penangan Konflik Masyarakat terhadap Pembangunan Mini Market Di Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Rudi Hardi).

Penolakan rakyat Kabupaten Enrekang yang menggandeng mahasiswa dan Asosiasi Pedagang Kecil enrekang untuk menolak keberadaan *Minimarket* atau pasar modern di tempat ini. Penolakan tersebut dilakukan aksi demo disejumlah tempat dikawal aparat Polres Enrekang. Hadirnya Mini Market yang beroperasi di Kabupten Enrekang akan menyensarakan pedagang kecil merurut pernyataan salah satu aktor mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi pemerintah dalam penaganan konflik masyarakat terhadap pembangunan mini market di Kabupaten Enrekang, dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penangan konflik pada kasus ini.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologis dengan informan 8 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan *FGD(Focus Group Discussion)* yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategipemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat di Kabupaten Enerkang ini ada empat yaitu, memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali
Kata Kunci : Strategi, Enrekang, Minimarket, Konplik Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Masyarakat Terhadap Pembangunan Mini Market Di Kabupaten Enrekang”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua itu “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Masyarakat Terhadap Pembangunan Mini Market Di Kabupaten Enrekang” telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

Dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan dan Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II, yang senantiasa telah banyak meluangkan waktunya memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan solusi terbaik kepada penulis.

Seluruh pihak Dari kantor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Makassar, dan Kantor PT. Indofood Sukses Makmur Kota Makassar yang telah

menerima, bekerjasama, membantu, memberikan data, memberikan ijin mengupulkan informasi dan data melalui wawancara dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada Almarhum Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan bimbingan dan pelajaran bagi penulis, Seluruh civitas akademik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Mulai dari pegawai tata usaha hingga para dosen yang senantiasa memberi arahan dan ilmu selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini serta Seluruh sahabat dan teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semangat dan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Ibu kandung saya dan ayah saya yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaan (S1), Saudara dan saudari kandung saya beserta keluarga tercinta atas dorongan dan motivasinya sehingga ada semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada sahabat sahabat saya si Tampan Andi Baso Susanto Rusdy S.IP yang tidak hentinya memberikan support absurd dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini, dan tidak henti-hentinya memberikan hiburan selama proses pembuatan skripsi ini, dan tidak lupa pula kepada kakanda Muhammad Akbar A, Asmin Syarif,

S.PD, Ikram Idris S.IP, Aswar Annas S.Sos, Muchlis Budiman S.IP, Arif Hamzah S.Pd, Wahyudi Sidang S.T serta Adinda Sarni Astuti SE.

Demi kesempurnaan skripsi ini, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua dan Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan Amin.

Demi kesempurnaan skripsi ini, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua dan Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan Amin.

Makassar 28 Juli 2017

Abd Kadir S.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10

BAB II. PEMBAHASAN

A. Konsep Strategi	12
B. Konsep Strategi Penyelesaian Konflik.....	19
C. Konsep Perlawanan Masyarakat	25
D. Konsep Mini Market	34
E. Kerangka Pikir	37
F. Fokus Penelitian	38
G. Deskripsi Fokus Penelitian	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Pengabsahan Data	47

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	49
B. Strategi Pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang	53
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional. Namun pada masa sekarang ini pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli lebih cenderung berkurang jika dibandingkan pada masa dimana belum dibukanya pasar-pasar modern atau supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional. Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas pelayanan dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika dibandingkan berbelanja di pasar tradisional yang cenderung panas, berdesakan dan tempat atau lokasi yang kurang memadai.

Namun perubahan ini terjadi ditambah semakin berkembangnya pembangunan minimarket dan pasar modern yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri masyarakat maka hal ini berdampak negatif pula terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi rendah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangnya yang tidak terlalu banyak. Hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memang memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan banyak pihak. persoalan ini harus terdapat penyelesaian yang akan menguntungkan banyak pihak.

Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-

pasar modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Pada prinsipnya, perusahaan retail tidak akan terlepas dengan permasalahan seberapa besar kemampuan perusahaan retail dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Sumber dana perusahaan retail dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Sumber dana internal artinya dana yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan, yang terdiri atas laba. Sedangkan sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Berbeda dengan pasar tradisional yang masih morat-marit dalam pengelolaan dana. maka dari itu kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah saling menguntungkan antara berbagai pihak terkait. dan juga dapat menjadi solusi terbaik dalam perkembangan dan penyejeteraan dalam masyarakat.

Di Indonesia pangsa pasar dan kinerja usaha pasar tradisional menurun, sementara pada saat yang sama pasar modern mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi pasar tradisional sekitar 69,9% pada tahun 2004, menurun dari tahun sebelumnya (2003) sekitar 73,7%. Kondisi sebaliknya terjadi pada Supermarket dan Hypermarket, kontribusi mereka kian hari kian besar. Pada tahun 2003 kontribusi pasar modern sebesar 26,3 % mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, 2004 menjadi 30,1% (Anonymous, 2007).

Menurunnya kinerja pasar tradisional selain disebabkan oleh adanya pasar modern, penurunannya justru lebih disebabkan oleh lemahnya daya saing para peritel tradisional (Harmanto, 2007). Kondisi pasar tradisional pada umumnya

memprihatinkan. Banyak pasar tradisional yang tidak terawat sehingga dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern kini pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern. Ekapribadi (2007) menambahkan bahwa mengenai kelemahan yang dimiliki pasar tradisional. Kelemahan tersebut telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit di ubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (*collateral*) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (*economies of scale*), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen (Wiboonpongse dan Sriboonchitta 2006). Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Paesoro (2007) menunjukkan bahwa penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Supermarket sebenarnya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada di pasar tradisional.

Di antara berbagai kelemahan yang telah disebutkan di atas, pasar tradisional juga memiliki beberapa potensi kekuatan, terutama kekuatan sosio emosional yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek . Aspek-aspek tersebut diantaranya harganya yang relatif lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberikan banyak pilihan produk segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja memegang langsung produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar tradisional lebih dikenal memiliki banyak kelemahan, antara lain kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau, dan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial masyarakat yang berubah, dimana wanita diperkotaan umumnya berkarier sehingga hampir tidak mempunyai waktu untuk berbelanja ke pasar tradisional (Esther dan Dikdik, 2003).

Perubahan gaya hidup konsumen dalam perilaku membeli barang ritel diantaranya dipengaruhi oleh kemudahan dan penjaminan mutu dari pasar modern, diantaranya: *Pertama* melalui skala ekonominya, pasar modern dapat menjual lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah. *Kedua*, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses publik. *Ketiga*, pasar modern menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit untuk peralatan rumah tangga berukuran besar. *Keempat*, produk yang di jual dipasar modern, seperti bahan

pangan, telah melalui pengawasan mutu dan tidak akan dijual bila telah kadaluwarsa (Setiadi N, 2003).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SMERU (Suryadarma et al, 2007), mereka melakukan berbagai strategi harga seperti strategi limit harga, strategi pemangsaan lewat pemangkasan harga (*predatory pricing*), dan diskriminasi harga antar waktu (*inter-temporal price discrimination*). Misalnya memberikan diskon harga pada akhir minggu dan pada waktu tertentu. Sedangkan strategi nonharga antara lain dalam bentuk iklan, membuka gerai lebih lama, khususnya pada akhir minggu, *bundling/tying* (pembelian secara gabungan), dan parkir gratis.

Survei yang dilakukan AC Nielsen (Agustus 2004) menunjukkan, meski jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 1,7 juta unit atau mengambil porsi 73 persen dari keseluruhan pasar yang ada, namun laju pertumbuhan pasar modern ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional. Yang tergolong ke dalam pasar modern ini adalah hipermarket, supermarket, minimarket, dan departemen store. Pertumbuhan pasar tradisional hanya mencapai 5 persen per tahun. Sedangkan pasar modern mencapai 16 persen. Secara lebih rinci disebutkan bahwa mini market mempunyai pangsa pasar sebesar 5 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 15 persen. Pangsa pasar supermarket mencapai 17 persen dengan tingkat pertumbuhan 7 persen. Adapun hipermarket, dengan pangsa pasar 5 persen laju pertumbuhannya mampu melejit hingga 25 persen per tahun. Jadi tingkat pertumbuhan pasar modern rata-rata adalah 16 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan, pertumbuhan pasar modern di Indonesia, Lebih

lanjut dapat disimpulkan bahwa sulitnya pasar tradisional bersaing menghadapi pasar modern disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, Pertama, kondisi fisik pasar tradisional secara umum tertinggal dibandingkan pasar modern yang bersih dan nyaman, sehingga konsumen lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern. Kedua, pasar modern berlokasi tidak jauh (kurang dari 10 km) dari lokasi pasar tradisional, mengakibatkan semakin banyak konsumen yang beralih ke pasar modern. Ketiga, dengan kekuatan modal, anak perusahaan atau cabang-cabang *hypermarket* atau *supermarket* kini mudah diakses warga hingga tingkat kelurahan atau permukiman, sedangkan para pedagang di pasar tradisional adalah pengusaha mikro. Di samping itu, pendirian cabang-cabang itu berbasis waralaba atau sistem sewa, sehingga orang bebas membeli lisensinya ataupun menyewa tempat. Keempat, belum adanya peraturan pemerintah yang spesifik mengatur mengenai pendirian pasar modern.

Di Indonesia, *supermarket* lokal telah ada sejak 1970-an, meskipun masih terkonsentrasi di kota-kota besar. *Supermarket* bermerek asing mulai masuk ke Indonesia pada akhir 1990-an semenjak kebijakan investasi asing langsung dalam sektor usaha ritel dibuka pada 1998. Meningkatnya persaingan telah mendorong kemunculan supermarket di kota-kota kecil dalam rangka mencari pelanggan baru dan terjadi perang harga. Akibatnya, bila supermarket Indonesia hanya melayani masyarakat kelas menengah-atas pada era 1980-an sampai awal 1990-an (CPIS 1994), penjamuran supermarket hingga ke kota-kota kecil dan adanya praktik pemangsaan melalui strategi pemangkasan harga memungkinkan

konsumen kelas menengah-bawah untuk mengakses supermarket (Suryadarma, 2007).

Kehadiran peritel modern pada awalnya tidak mengancam pasar tradisional. Kehadiran para peritel modern yang menyasar konsumen dari kalangan menengah keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan dan kualitas yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional. Namun sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. Supermarket dan Hypermarket tumbuh bak cendawan dimusim hujan. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan dimasyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat menuntut hal yang berbeda di dalam aktifitas berbelanja. Kondisi ini masih ditambah semakin meningkatnya pengetahuan, pendapatan, dan jumlah keluarga berpendapatan ganda (suami istri bekerja) dengan waktu berbelanja yang terbatas. Konsumen menuntut peritel untuk memberikan nilai lebih dari setiap sen uang yang dibelanjakan. Peritel harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut jika tak ingin ditinggalkan para pelanggannya (Ekapribadi, 2007).

Pengaruh datangnya pasar modern terhadap pasar tradisional sangat kuat sehingga selalu terjadi pro-kontra antara para pelaku bisnis retail modern. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika masuknya pasar modern dalam suatu wilayah atau kota diharapkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam hal ini adalah pemuda dan remaja yang baru lulus sekolah tingkat atas yaitu SMA atau yang setara.

Di dalam berbagai penelitian singkat di berbagai daerah industri menunjukkan bahwa pengangguran memerlukan penanganan segera . Dalam hal ini diharapkan bahwa masuknya pasar modern adalah dapat mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak akan tetapi di dalam bisnis-bisnis retail bahwa manajemen lebih mementingkan tenaga kerja angkatan baru yakni adalah para remaja yang baru lulus Sekolah Menengah Atas atau SMA yang setara. Pada awalnya pusat perbelanjaan atau pasar modern ini berasal dari pasar-pasar tradisional yang semakin berkembang. Ada kalanya gedung yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan ini dibangun di atas pasar-pasar tradisional . Hal ini menimbulkan fenomena lain yaitu semakin tersisihnya pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional.

Hal ini juga menyangkut individu bagi calon customer/pembeli itu sendiri akan kemanakah mereka dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Pada prinsip-prinsip dasar yang dipakai setiap masyarakat untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk membelanjakannya, termasuk gabungan antara kebutuhan publik dan pribadi, seharusnya berjalan dengan baik asalkan keputusan tersebut hanya atau terutama mempengaruhi anggota-anggota masyarakat yang berlaku. Namun diharapkan masuknya pasar modern atau yang sejenisnya tidak mengganggu pasar tradisional yang sudah dulu berdiri sejak belum masuknya pasar modern.

Dibukanya tempat-tempat perbelanjaan modern menimbulkan kegamangan akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah perkotaan. Hilangnya pasar yang telah berpuh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan dikhawatirkan akan akan

mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya pasar-pasar modern pemerintah harus tanggap dan membuat peraturan-peraturan perundangan dan berharap mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. Akan tetapi juga tidak mematikan hadirnya pasar-pasar modern. Keberadaan pasar tradisional dari satu sisi memang banyak memiliki kekurangan seperti lokasinya yang kadang mengganggu lalu lintas, kumuh, kurang tertata, dan lain-lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasar tradisional memegang peran yang cukup penting dalam perekonomian, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional. Sehingga sudah selayaknya pemerintah kota memperhatikan eksistensi pasar tersebut.

Pasar modern (*Minimarket*) yang mulai merangsek masuk di Kabupaten Enrekang adalah bagaian dari pasar globalisasi yang menuai pro dan kontra antara pemerintah daerah kab. Enrekang dan masyarakat menengah kebawah. Pasar global MEA sudah menghendaki itu, belum tentu mematikan usaha pedangan kecil sehingga pemda sebatas mengendalikan kajian mendalam menurut pernyataan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang dimuat di koran (*Radar makassar*). Sementara penolakan rakyat Kabupaten Enrekang yang menggandeng mahasiswa dan Asosiasi Pedagang Kecil enrekang untuk menolak keberadaan *Minimarket* atau pasar modern di tempat ini. Penolakan tersebut dilakukan aksi demo di sejumlah tempat dikawal aparat Polres Enrekang. Hadirnya Mini Market yang beroperasi di Kabupten Enrekang akan menyensarkan pedagang kecil menurut pernyataan salah satu aktor mahasiswa, sumber (*Radar Makassar*). Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah

tersebut dengan mengangkat judul penelitian tentang **“Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Masyarakat Terhadap Pembangunan Minimarket Di Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimna strategi pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembagunan Minimarket di Kabupaten Enrekang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembagunan Minimarket di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembagunan Minimarket di Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembagunan Minimarket di Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbagan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai strategi pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembangunan Minimarket di kabupaten Enrekang.
- b. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang menyangkut strategi pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembangunan Minimarket di kabupaten Enrekang

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber sumbagan pemikiran serta informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi Pemerintah

1. Pengertian Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa strategi berkaitan erat dengan peperangan. Namun sekarang ini, istilah strategi digunakan oleh sejumlah organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, tetapi aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.

Marrus (2002) mendefinisikan strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.

Menurut Blueck dan Jaunch (dalam Saladin, 2003) Definisi strategi ialah sebuah rencana yang disatukan, luar dan terintegritas yang menghubungkan dan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utam dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Beberapa faktor penting dalam strategi, yaitu:

- a. Adanya rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan.
- b. Adanya analisis terhadap lingkungan.

c. Strategi dirancang untuk tujuan dan sasaran yang dicapai.

Pernyataan diatas juga didukung oleh Mulyana (dalam Umar, 2002) menjelaskan ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Rumusan strategi paling tidak mesti memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasikan, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan, hasil apa yang akan diperoleh.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Andrews (dalam Kuncoro, 2004) tentang strategi yaitu pola sasaran, tujuan dan kebijakan atau rencana umum untuk meraih tujuan yang ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

Pendapat Itami (dalam Kuncoro, 2004) tentang strategi yaitu penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan.

Strategi menurut Kuncoro (2004) strategi berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola

tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Ide bahwa strategi “menetapkan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya “menyatakan bahwa keputusan strategi yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif.

Menurut Suwarsono (2012:86) mengatakan strategi pengembangan adalah suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berbeda dimasa depan.

2. Pengertian Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kanca retaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik menjadi lebih kuat di banding kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang di miliki, antara lain

kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak penyelidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.

Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik atau independen.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota, serta di bantu oleh wakilnya. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah merupakan suatu gejala yang berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan

dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain. Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah moderen dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat.

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13) dan Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000:192) mengatakan bahwa pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat, pemerintah dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu suatu yang mengajarkan bagaimana yang terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayan umum.

3. Pengertian Strategi Pemerintah

Strategi yang dilakukan pada sektor pemerintah merupakan upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan di masa

depan dengan menganalisis situasi dan kondisi negara di masa sekarang dan masa depan. Dalam penyelenggaraan pemerintah, terdapat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik. Ketika kinerja organisasi termasuk pemerintahan dan negara dibahas, hampir pasti ada yang menempati posisi pada dua titik ekstrem yaitu terburuk (terendah) dan terbaik (tertinggi). Namun demikian juga hampir dapat dipastikan bahwa yang berada pada dua posisi ekstrem tersebut hanya berjumlah sedikit. Jumlah yang paling banyak akan berada pada posisi tengah (*intermediate*), tidak istimewa tetapi juga tidak berada dalam posisi paling rendah. Setidaknya jumlah yang berada pada masing-masing titik ekstrem tidak sebanyak yang berada pada posisi di tengah. Itulah yang juga dialami oleh pemerintah dan negara di dunia sekarang ini (Rotberg dalam Suwarsono: 2012).

Dalam konteks negara sering dikenal dengan empat macam tingkatan: kuat (*strong*), lemah (*weak*), gagal (*failed*), dan kolaps (*collapsed*). Posisi tersebut biasanya dikaitkan dengan kemampuan negara (pemerintah) menjaga stabilitas politik sekaligus menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya, ekonomi, dan politik secara berkelanjutan. Jika terus gagal, pemerintah menjadi kehilangan legitimasi kehadirannya di mata dan hati rakyat. Negara dan pemerintahannya sepertinya tidak ada, bahkan terkesan tidak eksis untuk jangka waktu yang berkepanjangan (Rotberg dalam Suwarsono: 2012).

Pertanyaan yang tersisa kemudian adalah apakah kinerja pemerintah dan negara tersebut sepenuhnya terkait dengan pilihan strategi yang digunakan. Dalam dunia bisnis biasanya dapat ditemukan hubungan kausalitas yang jelas antara

pilihan dan eksekusi strategi dengan kinerja yang diraih. Hubungan sebab-akibat semakin terlihat transparan ketika perusahaan berada dalam lingkungan bisnis yang relatif stabil. Ketika lingkungannya memiliki tingkat keguncangan (*turbulensi*) yang tinggi, bisa jadi analisis sebab-akibat tidak dapat terlihat. Kaitan antara strategi dan kinerja sepertinya tidak begitu mudah ditemukan pada organisasi pemerintahan. Karakteristik khas pemerintahan menjadikannya lebih mudah untuk diarahkan meraih hal-hal yang termasuk dalam kategori sedang-sedang saja. Tidak mudah untuk berpikir jangka panjang dan rasional, apalagi disertai dengan target kinerja yang sangat baik, terutama jika politisi dan birokrat pemangku kekuasaan ternyata tidak memiliki waktu berkuasa yang cukup. Kepentingan mereka cenderung ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi dibanding kepentingan publik (Mulgandalam Suwarsono: 2012).

Dengan kata lain, diperlukan rekayasa politik jika dikehendaki adanya pemerintahan yang memiliki orientasi strategis. Kehadiran strategis bukan sebuah keniscayaan. Inilah yang secara *implicit* dikatakan oleh Kelman dan Myers (2009). Bukan tidak mungkin pemerintahan memiliki peluang yang besar untuk meraih keberhasilan, sekalipun memiliki program dan strategi yang ambisius. Ketika pemerintah berhasil memenuhi syarat-syarat pendahuluan yang diperlukan, kemungkinan keberhasilan tetap terbuka. Hanya saja syarat-syarat yang diperlukan tampak begitu banyak dan tidak mudah untuk dipenuhi. Sepertinya keberhasilan strategi selalu memerlukan kerja ekstra yang mungkin justru bisa jadi berupa kerja ekstra luar biasa.

B. Konsep Strategi Penyelesaian Konflik

1. Pengertian Konflik

Setiadi & Kolip (2011:345)Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Lebih lanjut Webster dalam Pearce dan Robinson (2008:9) menyatakan bahwa “*conflict*” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu berkembang dengan masukan “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide, dan lain-lain”. Dengan demikian istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologi, dibalik konfrontasi fisik yang terjadi selain konfrontasi fisik itu sendiri.

2. Bentuk Konflik

Secara garis besar konflik dalam masyarakat dapat diklarifikasikan kedalam beberapa bentuk berikut ini :

a) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, menurut Lauer (2001:98) konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- a. Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa bencidan dendam dari seorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrok-bentrok fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas dan lain sebagainya.

b. Konflik Konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

b) Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik Kusnadi (2002:67) membaginya menjadi 3 konflik yaitu :

- a. Konflik Vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat didalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
- b. Konflik horisontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- c. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrem. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

c) Pengertian Strategi Penyelesaian Konflik

Menurut Nasikun (2003:22) menjelaskan beberapa strategi penyelesaian konflik yang lazim dipakai yakni, konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan). Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah yakni, cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara formal jika cara

pertama membawa hasil. Berikut penjelasan dari ke empat bentuk strategi penyelesaian konflik menurut Nasikun (2003:25), yakni :

1. Konsiliasi (*conciliation*): pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
2. Mediasi (*mediation*): bentuk ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
3. Arbitrasi : berasal dari bahasa latin *arbitrium* artinya melalui pengendalian, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsoliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tinggi.
4. Persiatan : didalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Sedangkan menurut Permadi (2011), menjelaskan bahwa Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi ialah kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik yakni :

a. Kompetisi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah *win-lose orientation*.

b. Akomodasi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian.

c. Sharing

Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.

d. Kolaborasi

Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem (*problem-solving approach*) yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.

e. Penghindaran

Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

d) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Menurut G. Polya

Goerge Polya dalam Veby (2012), memberikan saran untuk mengajar mahasiswa matematika dan mini ensiklopedia istilah heuristik. Buku yang telah

diterjemahkan dalam 17 bahasa dan telah terjual lebih dari satu juta eksemplar ini, memperkenalkan 4 langkah dalam penyelesaian masalah yang disebut *Heuristik*. Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah masalah dalam menemukan solusi masalah. Heuristik tidak menjamin solusi yang tepat, tetapi hanya memandu dalam menemukan solusi dan tidak menuntut langkah berurutan. Empat langkah tersebut yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali.

a. Memahami Masalah

Pelajar seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah karena semata-mata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya. Atau mungkin ketika suatu masalah diberikan kepada anak dan anak itu langsung dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, namun soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi/syarat apa saja yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil dari banyak penelitian, anak yang rutin dalam latihan pemecahan masalah akan memiliki nilai tes pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang jarang berlatih mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi

tantangan dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah.

b. Merencanakan Pemecahan

Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai bergantung dari seberapa sering pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Semakin sering kita mengerjakan latihan pemecahan masalah maka pola penyelesaian masalah itu akan semakin mudah didapatkan. Untuk merencanakan pemecahan masalah kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat-ingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat / pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian barulah menyusun prosedur penyelesaiannya.

c. Melaksanakan Rencana

Langkah ini lebih mudah dari pada merencanakan pemecahan masalah, yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunana dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian.

d. Melihat Kembali

Kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif, apakah strategi yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah strategi dapat dibuat generalisasinya. Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan memantapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru yang akan datang.

C. Konsep Perlawanan Masyarakat

1. Pengertian Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang di kemukakan Weber (2005). Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau *social movement*, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.

Scott (2002), Mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.

Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat pembedaan yang lebih

jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, organik, sistematis dan kooperatif. *Kedua*, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau *Keempat*, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinas.

Menurut Fakhri (2003), Gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.

Soekanto dan Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. *Kedua*, adanya penggantian basis legitimasi, *Ketiga*, perubahan sosial yang terjadi bersifat *massif* dan *pervasive* sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan *Keempat*, koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan

pemerintahan yang baru. Dan Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. *Pertama*, daya dukung struktural (*structural conduciveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). *Kedua*, adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan. *Ketiga*, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. *Keempat*, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. *Kelima*, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan tindakan yang telah direncanakan.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: *Pertama*, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, *Kedua*, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, *Ketiga*, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau *Keempat*, Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala- gejala kejahatan seperti: pencurian kecil- kecilan, hujatan, makian, bahkan pura- pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah

sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan- percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi, menurut, semua itu hanya merupakan akibat- akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan-singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan.

Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga, dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya sehingganya dalam melakukan perlawanan sering terjadi indikasi adanya intimidasi dan refresifitas dari aparat Negara dan dari lawan politiknya.

Scott menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi- sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencah dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan

koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultur- sub kultur perlawanan yang kaya.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, kaum miskin kota, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status *quo* yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual (Zubir, 2002).

Adanya empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok- kelompok dominan. Seperti yang diikuti oleh paper yang berjudul "*large dam victims and*

their defenders: the emergence of an anti- large dam movement in Indonesia”, yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor- aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (peremajaan pasar) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori-teori yang mendasari gerakan tersebut.

Berkaitan dengan cara-cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

- a. perlawanan yang diungkapkan secara individual
- b. perlawanan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif atau bersama.

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara mulai dari aksi protes terbuka yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara- cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival. Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat (Sangaji, 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

- a. para pendukung spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut

b. para pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan (Sangaji, 2000).

Sangaji (2000) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio-kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan-alasan yang bersifat sosial, ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

2. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Kata masyarakat sendiri pasti sudah sering kita dengar, seperti masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat Bugis, masyarakat Betawi, dan lain lain. Sering kali diartikan secara mudah sebagai warga tetapi konsep masyarakat sendiri cukup rumit untuk dapat dimengerti. Berdasarkan ilmu etimologi yang mempelajari asal usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan berasal dari kata *musyarak* yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan *society*. Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi

dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

Karl Marx (2001) berpendapat bahwa pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya.

Sedangkan Mansyur Fakhri (Zubir 2002) berkata bahwa pengertian masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian akan terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat dengan pola pikir yang kuno dan hanya dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan saja sedangkan masyarakat maju adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya di masa mendatang bersama orang-orang di sekitarnya meskipun tidak berada dalam golongan yang sama.

Masyarakat awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsur-angsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa Kecamatan lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara. Masyarakat tidak akan pernah terbentuk tanpa kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengahnya. Seorang pemimpin yang akan mengemudikan seluruh masyarakat

dapat dipilih dengan berbagai cara misalnya lewat pemungutan suara seperti Pemilu atau dilihat dari garis keturunannya. Dalam suatu daerah yang masih kental budaya leluhurnya, pemilihan pemimpin sudah terikat dengan aturan masing-masing yang disebut dengan adat istiadat.

Dalam objek kajian, sosiologi mengkaji tentang manusia dan aspek sosialnya yang sering disebut masyarakat, dan hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*social animal*) Sanderson (2010:43), yang perlu berinteraksi dan hidup bersama dalam menjalani kehidupan mereka, serta saling membutuhkan satu sama lainnya dalam mencapai tujuan, maka dari itu manusia harus berkelompok dan terorganisir yang sering disebut masyarakat. Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2000:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2000:22).

Masyarakat dalam interaksinya, menimbulkan produk-produk interaksi yang beranekaragam, seperti nilai-nilai sosial dan norma yang dianut dalam sebuah masyarakat tertentu secara individu maupun kelompok, termasuk juga pola hubungan dalam masyarakat, berdasarkan kesatuannya, masyarakat terbagi

menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota, oleh karena itu, masyarakat adalah manusia yang berinteraksi satu sama lain yang terikat atas aturan dan norma tertentu yang bersifat kontinu dan sifatnya terikat oleh rasa identitas bersama.

D. Konsep Minimarket

1. Pengertian Minimarket

Pengertian Minimarket Secara Kata merupakan gabungan dari kata, “mini” dan “market”. Mini berarti “kecil” sedang market berarti “pasar”. Jadi minimarket adalah sebuah pasar yang kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar. Minimarket dan toko kelontong memiliki banyak kesamaan. Toko kelontong kini juga sudah banyak yang menggunakan komputer. Toko kelontong juga sudah banyak yang menggunakan rak standar.

Secara bahasa Pengertian minimarket adalah pasar swalayan kecil. Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam "Toko Kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaannya disini biasanya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Sebuah minimarket jam bukanya juga lain dari sebuah supermarket, minimarket circle K 24 jam bukanya hingga 24 jam. Minimarket yang ada di Indonesia adalah

Alfamart, Indomaret, Ceriamart, Starmart, Circle K, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan lainnya.

Munculnya minimarket tentunya tidak terlepas dari persoalan perekonomian, suatu fase dari perkembangan perekonomian global. Sehingga untuk mengetahui mekanisme kerja minimarket maka kita perlu untuk mengkaji teori-teori ekonomi yang berkenaan dengan hal tersebut. Berikut teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi minimarket.

2. Kebijakan Tentang Penataan Minimarket

Minimarket, dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres 112/2007). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta diterbitkan oleh Gubernur (Pasal 12 Perpres 112/2007). Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Permendag 53/2008).

Dalam Pasal 3 Perpres 112/2007, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket adalah kurang dari 400m². Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112/2007 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga. Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag 53/2008 menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

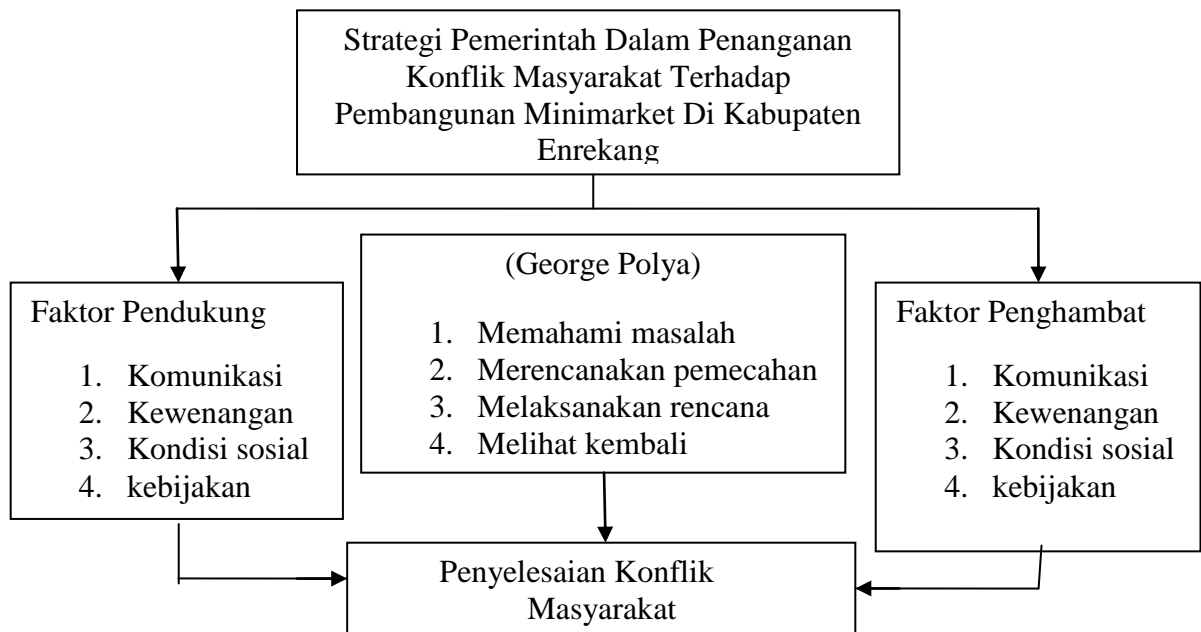
- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

E. Kerangka Pikir

Dibukanya tempat-tempat perbelanjaan modern menimbulkan kegamangan akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah perkotaan. Hilangnya pasar yang telah berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan.

Pasar modern (Minimarket) yang mulai merangsek masuk di Kabupaten Enrekang adalah bagian dari pasar globalisasi yang menuai pro dan kontra antara pemerintah daerah kab. Enrekang dan masyarakat menengah kebawah. Pasar global MEA sudah menghendaki itu, belum tentu mematikan usaha pedagang kecil sehingga pemda sebatas mengendalikan kajian mendalam menurut pernyataan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yang dimuat di koran (*Radar makassar*). Sementara penolakan rakyat Kabupaten Enrekang yang menggandeng mahasiswa dan Asosiasi Pedagang Kecil Enrekang untuk menolak keberadaan minimarket atau pasar modern di tempat ini. Penolakan tersebut dilakukan aksi demo di sejumlah tempat dikawal aparat Polres Enrekang. Hadirnya Minimarket yang beroperasi di Kabupaten Enrekang akan menyasarakan pedagang kecil menurut pernyataan salah satu aktor mahasiswa, sumber (*Radar Makassar*). Dari uraian diatas maka dibutuhkan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi berupa strategi yang nantinya dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan diatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini :

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Memahami masalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memahami permasalahan yang menyebabkan terjadinya perlawanan masyarakat terhadap pembangunan minimarket.
2. Merencanakan pemecahan merupakan langkah yang diambil Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket.

3. Melaksanakan rencana merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan pokok pemecahan masalah yang sudah direncanakan sebelumnya.
4. Melihat kembali merupakan evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap strategi dalam pemecahan masalah terhadap konflik masyarakat pada pembangunan minimarket.
5. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah dalam menangani konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket. Seperti :
 - a. Kewenangan
 - b. Komunikasi
 - c. Kondisi sosial-ekonomi
 - d. kebijakan
6. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemerintah dalam menangani konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket. Seperti :
 - a. Kewenangan
 - b. Komunikasi
 - c. Kondisi sosial-ekonomi
 - d. kebijakan
7. Penyelesaian konflik perlawanan masyarakat merupakan maksimalnya strategi yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti yakni dua bulan setelah ujian proposal dan bertempat di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kecil, Indomaret Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya: *Pertama*. lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang bermasalah terkait perencanaan pemerintah Kabupaten Enrekang memasukkan Minimarket dan penolakan masyarakat menengah kebawah terhadap kebijakan tersebut, *Kedua* lokasi penelitian berada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai pusat pemerintahan daerah), sangat berpengaruh dan menjadi model bagi daerah- daerah lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, *Ketiga*. Lokasi tersebut merupakan tempat pemukiman masyarakat menengah kebawah sehingga sangat sesuai bagi terjadinya konflik vertikal dan *Keempat*. lebih mudah dijangkau dan dekat dengan akses informasi lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Diharapkan

bahwa apa yang terlihat di lapangan di gambarkan secara lebih rinci, jelas dan akurat. Terutama apa yang dilihat pada perlawanan masyarakat terhadap upaya perencanaan masuknya Minimarket (pasar modern) di tengah-tengah pasar tradisional masyarakat Kabupaten Enrekang yang menuai pro dan kontra. Berhubungan dengan penelitian perlawanan masyarakat terhadap upaya rencana masuknya Minimarket di Kab Enrekang, Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel “*subject to change*” sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga focus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

2. Tipe penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan perlawanan masyarakat terhadap upaya masuknya Minimarket sehingga penulis dapat mengolah dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat di golongan ke dalam penelitian kualitatif. Bog dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dan pelaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang di hadapi.

Deskriptif-analitis adalah suatu upaya untuk menggambarkan hasil dari data-data yang diperoleh di lapangan, baik secara lisan maupun tulisan untuk kemudian dianalisis sebagai suatu kesimpulan penelitian. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi bagaimana bentuk perlawanan masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap perencanaan mauknya Minimarket di tengah-tengah pasar tradisonal, serta upaya seperti apa yang telah dilakukan masyarakat Kabupaten Enrekang untuk menyelesaikan kasus perencanaan masuknya pasar globalisasi atau Minimarket tersebut. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yakni suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer di kumpulkan melalui obserfasi, dokumentasi dan wawancara. yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan yang di butuhkan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

yaitu data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, dan dokumen-dokumen dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di

kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang di peroleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan adalah instansi yang terkait, dan masyarakat yang terkait. Dimana informan tersebut dipilih karena mereka di anggap mengetahui tentang strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan Minimarketdi Kabupaten Enrekang.

Tabel Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Hardi	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	HD	1
2	Darman	Staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan	DM	1
3	Bayu Sutrisno	Manajer Indomaret Kabupaten Enrekang	BS	1
4	Maulana	Tokoh Masyarakat	ML	1
5	Nia Daniati	Tokoh Masyarakat	ND	1
6	Muh. Anang H.	Tokoh Masyarakat	MA	1

7	Ardianto Amin	Tokoh Masyarakat	AA	1
8	Sudirman Effendi	Tokoh Masyarakat	SE	1
9	Surahman Karim	Staf Ahli Pemerintah Kab Enrekng	SK	1
Total informan			9 orang	

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, penelitian mengenai strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat terhadap pembangunan Minimarket di Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan mater

penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau pun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah di klasifikasikan tersebut di kontruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Data yang telah dikumpulkan yaitu analisa yang berwujud keterangan dan uraian yang menggambarkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun maksud dengan metode ini adalah bahwa analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang ada dari data sampel dengan menghubungkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan kesimpulan akhir dalam penelitian bahwa Teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri.
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, untuk menguji kredibilitas data tentang penerapan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada, pemerintah Kabupaten enrekang dan masyarakat Kabupaten enrekang yang menjadi objek.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuratan atau ketidakakuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Administrasi Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotakabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi

Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massarempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ende yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama Enrekang versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan, kemudian kerajaan ini bersifat Manurung dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "Pitue Massarempulu", yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'

5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'.

Akibat dari politik *Devide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verkaling*), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi *Landshchap*. Tiap *Landschap* dipimpin oleh seorang Arung (*Zelftbesteur*) dan dibantu oleh *Sulewatang* dan *Pabbicara* /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai *Kontroleur*. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan)

dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontrolleur (Tuan Peto).)

2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang.
4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) swaparaja , yakni:
 - a. swapraja enrekang
 - b. swapraja alla
 - c. swapraja buntu batu
 - d. swapraja malua
 - e. swapraja maiwa

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang (5 Swaparaja) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau Kabupaten Massarempulu. (Perlu ingat bahwa yang

disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain:

- a. Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
- b. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
- c. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
- d. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

B. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Perlawanan Masyarakat Terhadap Pembangunan Mini Market Di Kabupaten Enrekang

Strategi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menangani perlawanan masyarakat terhadap pembangunan mini market ialah Memahami masalah, Merencanakan pemecahan, Melaksanakan rencana, Melihat kembali dan akan dibahas dalam sub bab ini:

1. Memahami Masalah

Memahami masalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memahami permasalahan yang menyebabkan terjadinya perlawanan masyarakat terhadap pembangunan minimarket. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mengeluarkan izin operasi bagi minimarket yang tertuang dalam Perda No.6 Tahun 2016 tentang

urusan Pemerinta Daerah Kabupaten Enrekang bagian D tentang urusan pemerintah di bidang perdagangan, poin (a) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. Izin tersebut menjadi pemicu konflik antara pemerintah dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh hadirnya minimarket.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator Memahami Masalah:

“Jadi begini dek, masalahnya itu masyarakat menolak pembangunan *mini market* ini karena dianggap dapat mematikan perekonomian masyarakat-masyarakat enrekang, kenapa begitu? Karena jika *mini market* ini berdiri bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih memilih berbelanja di *mini market* ketimbang diwarung-warung milik masyarakat sekitar. Hal ini yang dikhawatirkan masyarakat dapat mengancam perekonomian sebagian masyarakat sehingga adanya perlawanan seperti ini dek” (wawancara dengan informan HD , pada tanggal 23 januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan selaku informan yang membahas tentang indikator Memahami Masalah, dapat diketahui bahwa perlawanan masyarakat ini muncul karena adanya kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa pembangunan *mini market* ini dapat mematikan perekonomian masyarakat sekitar, karena yang ditakutkan oleh masyarakat ini orang-orang akan jauh lebih memilih berbelanja di *mini market* ketimbang di kios-kios atau warung-warung milik masyarakat dan itu bisa merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari warung miliknya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

“Yah terkait pertanyaan adek tadi tentang memahami masalah, yah kami pahami masalahnya.. masalahnya itu masyarakat menolak adanya pembangunan *mini market*, kenapa? Karena pembangunan mini market ini dek dianggap mampu mengurangi pemasukan bahkan merugikan masyarakat yang menjadikan warungnya sebagai pemasukan utama”. (wawancara dengan informan yang berinisial DM pada tanggal 25 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap dengan dibangunnya *mini market* dapat mengurangi pemasukan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Dengan permasalahan seperti ini lah muncul perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak dengan keras adanya *mini market*.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market.

“Begini nak, kami menolak dengan tegas pembangunan mini market! Karena otomatis berdampak langsung ke ekonomi masyarakat-masyarakat menengah kebawah.. sudah pasti itu! Ini bukan di kota nak, kalau mau bangun *minimarket-minimarket* seperti itu di kota saja, enrekang ini nak. Jadi kami tetap menolak dengan tegas!” (wawancara dengan informan yang berinisial AA pada tanggal 18 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market dapat disimpulkan bahwa masyarakat menolak dengan tegas! Pembangunan mini market dikabupaten enrekang karena berdampak langsung diperekonomian masyarakat menengah kebawah, pembangunan mini market ini dianggap tidak cocok untuk didaerah seperti di Enrekang akan lebih bagusnya jika pembangunan mini market dilakukan dikota saja seperti di Makassar.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market.

“Kasihan dek masyarakat-masyarakat yang punya usaha grosir-grosiran, warung-warung kecil, atau kios-kios kalo jadi betul dibangun itu indomaret-indomaret atau apakah itu, karena begini kapan dibangun itu bisa dipastikan usaha-usaha masyarakat yg seperti saya sebutkan tadi akan mengalami kemunduran, dan kami tidak mau itu terjadi.. makanya kami lakukan perlawanan kepada pihak swasta yang bersangkutan!” (wawancara dengan informan yang berinisial ND pada tanggal 28 januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market dapat

disimpulkan bahwa perlawanan masyarakat ini muncul merupakan antisipasi dari dibangunnya *minimarket*, mereka menganggap bahwa jika pembangunan ini tetap berjalan, maka secara otomatis dapat mengakibatkan kemunduran bagi masyarakat-masyarakat yang mempunyai usaha, hal ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat masyarakat sehingga membuat perlawanan kepada pihak swasta selaku yang ingin mendirikan *minimarket*.

Berikut hasil wawancara dengan manajer indomaret selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market.

“Begini dek, kami pahami apa yang menjadi masalah selama ini. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa juga kalo masyarakat menolak, tapi kami tetap mengupayakan melakukan negosiasi dengan pihak masyarakat dan pemerintah agar pembangunan ini tetap berjalan”. (wawancara dengan inorman yang berinial BS pada tanggal 24 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh manajer indomaret selaku informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market dapat diketahui bahwa pihak indomaret sampai sekarang ini masih melakukan upaya negosiasi dengan masyarakat dan pemerintah agar pembangunan *minimarket* ini dapat tetap berjalan, dan untuk sampai sekarang ini pihak indomaret belum bisa melakukan apa-apa jika kata sepakat dari masyarakat dan pemerintah belum didapat.

Berikut hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, Tokoh masyarakat Enrekang, serta Manajer Indomaret Kabupaten Enrekang informan yang membahas tentang memahami masalah yang menjadi salah satu indikator dari strategi pemerintah dalam penanganan perlawanan masyarakat kabupaten enrekang yang menolak pembangunan mini market, dapat diketahui bahwa perlawanan masyarakat muncul karena adanya kekhawatiran dari masyarakat jika pembangunan *minimarket* dikabupaten enrekang ini dapat mematikan perekonomian masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha seperti grosir, kios, maupun warung karena mereka menilai bahwa nantinya masyarakat konsumen akan lebih memilih berbelanja di *mini market* dan akan meninggalkan kebiasaannya selama ini yang berbelanja di warung-warung. Dilain pihak itu sendiri pihak indomaret akan terus mengupayakan tahap negosiasi dengan pihak masyarakat dan pemerintah guna mendapatkan kata sepakat agar pembangunan tetap berjalan.

2. Merencanakan pemecahan

Merupakan langkah yang diambil Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam

menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Jadi untuk soal pemecahannya itu sendiri kami akan cabut perizinannya atau dibatalkan, karena pasti nanti akan ada gejolak dikalangan masyarakat khususnya pedagang kecil. Kami juga sudah ada himbauan dari pak Sekda dan DPRD Enrekang agar perizinannya ini dicabut, bahkan saya dengar pak sekda akan menurunkan Satpol PP untuk menutup *minimarket* tersebut, jika pihak yang bersangkutan tidak mendengar himbauan dari pemerintah” (wawancara dengan informan HD tanggal 12 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa surat izin minimarket yang sudah terbit akan dibatalkan, pasalnya bisnis waralaba dinilai akan mematikan usaha perdagangan masyarakat kelas bawah. bahkan sudah ada koordinasi langsung dari pak Sekda dan DPRD Kabupaten Enrekang agar perizinannya segera dicabut.

Berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Yah begini adek, terkait untuk pemecahan kasus ini kami sudah mendapat koordinasi dari pak Sekda dan DPRD Enrekang agar perizinan dari PT. Indomarco ini agar dicabut, selain karena dapat mematikan

usaha menengah kebawah milik masyarakat atau para pedagang, ini juga bisa memacu amarah dari kelompok-kelompok masyarakat.. kami sudah beberapa kali didatangi oleh kelompok-kelompok pedagang atau masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya” (wawancara dengan informan yang berinisial DM pada tanggal 17 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa perizinan dari pihak PT. Indomarco yang sebelumnya sudah terbit akan dicabut kembali atau dibatalkan karena jika terus berjalan *minimarket* tersebut akan mematikan usaha-usaha masyarakat menengah kebawah terkhusus pedagang kecil, di sisi lain dengan berdirinya *minimarket* tersebut dapat memancing amarah kelompok-kelompok pedagang atau masyarakat yang sebelum-sebelumnya sudah sering bolak-balik datang untuk berunjuk rasa atau menyuarakan aspirasinya.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Yah alhamdulillah kami sudah mendengar kabar bahwa perizinan indomaret yang dimarogangin, sama depannya mapolres Enrekang, dan di kota itu mau dicabut. Kami sangat mengapresiasi pemerintah khususnya pak chairul latanro dan arfan renggong yang sudah berani mengambil langkah tegas untuk menutup usaha yang bisa mengancam perekonomian

masyarakat kecil atau pedagang-pedagang” (wawancara dengan informan yang berinisial MH pada tanggal 17 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa masyarakat enrekang sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memecahkan permasalahan *minimarket* ini, karena apabila terus berjalan bisnis waralaba ini dapat mematikan perekonomian pedagang-pedagang kabupaten Enrekang terkhusus pedagang menengah kebawah.

Berikut hasil wawancara dengan Manajer PT. Indomarco atau indomaret kabupaten enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Iya dek, kami sudah dapat himbauan dari pemerintah kabupaten enrekang untuk menutup minimarket-minimarket yang sudah beroperasi & yang masih dalam pembangunan untuk dihentikan pembangunannya. Kami juga tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berkomentar banyak dek” (wawancara dengan informan yang berinisial BS pada tanggal 29 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. Indomarco atau indomaret kabupaten enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di

Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa dari pihak PT. Indomarco atau indomaret sudah mendapat himbauan dari pemerintah kabupaten Enrekang untuk menutup minimarket yang sudah beroperasi, dan yang masih dalam masa pembangunan dihentikan segala aktifitas pembangunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang, dan Manajer PT. Indomarco atau indomaret Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang dengan tegas mencabut izin dari pendirian minimarket, pemerintah beranggapan bahwa dengan berdirinya minimarket di Kabupaten Enrekang dapat mematikan perekonomian pedagang-pedagang menengah kebawah, selain itu juga dapat memancing amarah para kelompok-kelompok masyarakat yang sudah sering turun ke kantor pemerintahan di kabupaten enrekang guna menyuarakan aspirasi mereka yang menolak tegas berdiri dan beroperasinya minimarket di Kabupaten Enrekang.

3. Melaksanakan Rencana

Melaksanakan rencana merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan pokok pemecahan masalah yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melaksanakan rencana dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Terkait kapan dicabut izinnya yah secepatnya dek, lebih cepat lebih baik.. kan pak Sekda sudah mengatakan bahwa kapan masih beroperasi ini minimarket akan dibawakan Satpol PP. Jadi begitu dek” (wawancara dengan informan HD pada tanggal 13 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa pencabutan izin operasi pada minimarket indomaret akan secepatnya dilakukan, sebagaimana penyampaian bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang yang disampaikan ulang oleh informan bahwa jika kedapatan tetap beroperasi minimarket tersebut maka akan dikordinasikan oleh Satpol PP yang akan mengeksekusi langsung minimarket tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Staf Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melaksanakan rencana dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Kalo ditanya kapan pelaksanaan rencana kami belum koordinasikan kepihak-pihak yang terkait, tapi insya allah secepatnya kami usahakan pencabutan izin ini, paling lambat setelah lebaran nanti” (wawancara dengan informan yang berinisial DM pada tanggal 19 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator merencanakan pemecahan dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa pencabutan izin minimarket ini belum dikoordinasikan bahwa kapan tepatnya minimarket ini dilarang beroperasi, namun informan menjanjikan bahwa secepatnya dan paling lambat setelah lebaran tahun ini.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melaksanakan rencana dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Kami belum dapat kabar bahwa kapan semua itu akan dilaksanakan tapi kami berharap kalo bisa sebelum ramadhan ini minimarket itu sudah berhenti beroperasi, yah jadi begitu lebih cepat lebih baik” (wawancara dengan informan yang berinisial MA 6 Februari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melaksanakan rencana dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa belum ada kabar pasti kapan izin minimarket ini dicabut dan

dihentikan, namun masyarakat berharap bahwa jauh lebih baik jika izin pencabutan ini sudah keluar sebelum ramadahan tahun ini”

4. Melihat Kembali

Merupakan evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap strategi dalam pemecahan masalah terhadap konflik masyarakat pada pembangunan minimarket.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melihat kembali dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Kami sudah mengevaluasi langkah-langkah apa yang akan dan sudah diambil, dan langkah ini lah yang kami anggap terbaik, dengan mencabut izin pendirian minimarket di Enrekang, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sudah pasti ini merupakan kebijakan yang tepat” (wawancara dengan informan HD pada tanggal 23 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melihat kembali dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa hasil dari evaluasi atau melihat kembali dapat diketahui bahwa kebijakan pencabutan izin untuk pendirian minimarket ini sudah sangat tepat, mengingat juga kepentingan masyarakat itu sangat penting.

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melihat kembali dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang:

“Untuk kebijakan tentang pencabutan izin saya rasa itu sudah paling tepat dan tidak usah dievaluasi kembali, karena jika dievaluasi kembali nantinya ada lagi kepentingan-kepentingan busuk yang akan masuk. Jadi saya rasa ini sudah yang terbaik” (wawancara dengan informan pada tanggal yang berinisial MAH pada tanggal 23 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang selaku informan yang membahas tentang indikator melihat kembali dalam strategi pemerintah dalam menangani perlawanan masyarakat terkait pembangunan minimarket di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap kebijakan ini sudah paling tepat, karena jika akan dievaluasi kembali ditakutkan nantinya ada perubahan-perubahan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, atau masuknya suara-suara yang tidak diinginkan oleh pihak masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat pemerintah dalam penanganan konflik masyarakat terhadap konflik pembagunan Minimarket di Kabupaten Enrekang

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah dalam menangani konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket.

a. Kewenangan

Pemerintah selaku aktor yang memiliki legalitas formal dan moral tentu berkewenangan untuk memediasi konflik masyarakat dengan pihak PT.INDOMARCO, dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan untuk meredam konflik tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Enrekang :

“Pemerintah selaku penentu kebijakan, memiliki kewenangan menyelesaikan konflik tersebut yang melibatkan masyarakat pedagang tradisional dan pemilik minimarket, keterlibatan DPRD juga sangat dibuthkan selaku tempat pengartikulasian kepentingan masyarakat” (wawancara dengan informan yang berinisial ED pada tanggal 24 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas koperasi industri dan perdagangan Enrekang dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya untuk menyelesaikan konflik antara PT. INDOMARCO dengan pedagang tradisional serta diperlukan keterlibatan DPRD dalam penyelesaian konflik.

b. Komunuikasi aktor

Pemerintah dapat melakukan komunikasi kepada pihak masyarakat penolak minimarket melalui salahseorang tokoh yang terlibat dalam pengorganisiran penolakan minimarket, sehingga eskalasi konflik cenderung dapat diminimalisir. Pihak DPRD juga telah menyatakan sikap kepada masyarakat yang menolak minimarket bahwa pihak DPRD berjanji akan mencabut izin usaha minimarket, sehingga masyarakat merasa tidak diabaikan oleh pemerintah.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat :

“Pemerintah sudah berjanji kepada masyarakat untuk segera mencabut izin usaha operasi minimarket, jadi masyarakat sudah mulai tenang” (wawancara dengan informan yang berinisial SK pada tanggal 24 Januari 2017).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diperoleh informasi kalau pemerintah daerah telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan segera mencabut izin operasi dari pihak minimarket. Hal ini diperlukan agar masyarakat Enrekang tidak resah terhadap hadirnya minimarket tersebut.

B. Kondisi sosial ekonomi

Masyarakat yang terlibat dalam penolakan minimarket masih mengedepankan asas moralitas sehingga mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di lain sisi masyarakat, secara ekonomi belum begitu banyak dirugikan dengan pembangunan minimarket karena hingga saat ini baru terdapat satu minimarket yang beroperasi dan dua diantaranya telah ditutup.

Hasil wawancara dengan Staf Disperindak Kabupaten Enrekang :

“Dari pihak Disperindag telah melakukan survei lapangan dan ditemukan kondisi ekonomi masyarakat sekitar minimarket memang mengalami penurunan pendapatan akibat beroperasinya minimarket, namun masih terkendali” (wawancara dengan yang berinisial DM pada tanggal 17 Februari 2017)

Dari wawancara dengan pihak disprendag Enrekang dapat ditarik kesimpulan bahwa survei lapangan yang dilakukan pihak disperindag menemukan fakta mengejutkan bahwa masyarakat penjual kecil yang

berada diskitar minimarket tersebut mengalami penurunan pendapatan.

c. Kebijakan

Pemerintah berjanji kepada masyarakat untuk menyusun kembali kebijakan terkait pencabutan izin yang sejak awal telah dikeluarkan pemerintah, setelah mempertemukan pihak masyarakat dengan pihak minimarket, upaya ini dilakukan untuk meretas konflik antara pihak minimarket dan pihak masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Disperindag :

“ Pemerintah akan segera Mencabut izin setelah tokoh masyarakat dan pihak minimarket telah menuai kesepakatan” (wawancara dengan informan yang berinisial HD pada tanggal 18 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dengan kepala disperindag menyatakan bahwa pemerintah akan menghintakan dan mencabut izin pihak minimarket setelah pihak tokoh masyarakat dan pihak minimarket menemui kesepakatan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemerintah dalam menangani konflik masyarakat terhadap pembangunan minimarket.

a. Komunikasi

Pemerintah sulit membangun komunikasi dengan baik terhadap pihak minimarket, disebabkan oleh pihak minimarket seringkali tidak mengindahkan atau tidak merespon baik panggilan pemerintah untuk

duduk bersama dengan masyarakat penolak pembangunan minimarket. Pihak minimarket juga masih berkeras untuk tetap melanjutkan pembangunan minimarket, dengan situasi seperti ini membuat pemerintah kesulitan melakukan mediasi. Hasil wawancara dengan Staf Ahli Pemerintahan :

“Kesulitan pemerintah untuk memediasi konflik ini dengan cepat, disebabkan karena pihak minimarket beberapa kali dipanggil namun tidak direspon dengan baik” (wawancara dengan informan yang berinisial SK pada tanggal 20 Februari 2017).

Wawancara dengan staf pemerintah Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan kalau pemerintah telah berupaya memediasi kedua belah pihak yang bertikai akan tetapi respon yang diberikan tidak sesuai sehingga pemerintah berulang kali melakukan pemonitoran.

b. Kebijakan

Perda No.6 Tahun 2016 memuat tentang izin usaha, kebijakan ini menjadi landasan pihak minimarket untuk tetap memaksakan operasinya, walaupun bagi masyarakat sekitar akan sangat merugikan pada sektor pasar tradisional.

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Pemerintahan :

“Ini juga yang jadi soal, karena pembangunan minimarket itu jika kita berlandaskan Perda No.6 Tahun 2016 maka itu sah-sah saja untuk dibangun, tetapi muncul persoalan lain yaitu masyarakat pedaganag tradisional merasa dirugikan dengan kehadiran minimarket. Dari kedua kubu yang terlibat konflik tersebut memang masing memiliki hak yang jelas dan berdasar pada aturan, karenanya untuk menyelesaikan konflik ini tentu dengan formulasi kebijakan baru yang tidak merugikan kedua kubu, dan itu butuh waktu dan proses” (wawancara dengan informan yang berinisial SK pada tanggal 20 Februari 2017).

Dari hasil wawancara dengan staf pemerintah kalau salah satu faktor yang menghambat adalah Perda No.6 tahun 2016 karena perda ini melandasi sehingga pembangunan minimarket di Enrekang bisa terlaksana. Namun ternyata dapat ditarik benang merahnya kalau ternyata perda tersebut justru merugikan masyarakat pedagang tradisional.

c. Kondisi sosial ekonomi

Masyarakat sekitar pembangunan minimarket sampai saat ini masih mengantisipasi operasi minimarket disebabkan pemerintah belum secara resmi menguatkan kebijakan mengenai pencabutan izin usaha operasi minimarket, dan apabila kekhawatiran masyarakat betul-betul terbukti maka akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, saat itu pula masyarakat akan lebih memilih bertindak dengan keinginannya sendiri yang tidak menutup kemungkinan terjadi gerakan anarkis. Secara ekonomi kehadiran minimarket dapat dipastikan menyingkirkan pedagang tradisional dari pasar, merupakan alasan yang rasional bagi masyarakat penolak minimarket untuk tetap melakukan perlawanan.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat :

“Kalau pembangunan minimarket tetap dipaksakan, kemungkinan besar akan terjadi konflik, karena sebelum minimarket ada, masyarakat yang beroperasi di pasar tradisional berpendapatan lumayan baik”. Beberapa koperasi juga sudah tidak berjalan karena kalah bersaing dengan minimarket” (wawancara dengan informan yang berinisial SE pada tanggal 24 Februari 2017).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat disimpulkan kalau pembangunan minimarket jika terus dipaksakan akan menimbulkan konflik besar

antara masyarakat dengan pihak minimarket tidak bisa dihindarkan. Karena masyarakat berpendapat sebelum minimarket tersebut hadir kondisi perekonomian masyarakat stabil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Strategi Pemerintah Dalam Penangan Konflik Masyarakat Terhadap Pembangunan Minimarket Di Kabupaten Enrekang ada 4 yaitu:

1. Memahami Masalah, perlawanan masyarakat ini muncul karena adanya kekhawatiran dari masyarakat jika pembangunan *minimarket* di kabupaten Enrekang ini dapat mematikan perekonomian masyarakat menengah kebawah yang mempunyai usaha seperti grosir, kios, maupun warung karena mereka menilai bahwa nantinya masyarakat konsumen akan lebih memilih berbelanja di *dimini market* dan akan meninggalkan kebiasaannya selama ini yang berbelanja di warung-warung. Dilain pihak itu sendiri pihak indomaret akan terus mengupayakan tahap negosiasi dengan pihak masyarakat dan pemerintah guna mendapatkan kata sepakat agar pembangunan tetap berjalan.
2. Merencanakan pemecahan, pemerintah Kabupaten Enrekang dengan tegas mencabut izin dari pendirian minimarket, pemerintah beranggapan bahwa dengan berdirinya minimarket di Kabupaten Enrekang dapat mematikan perekonomian pedagang-pedagang menengah kebawah, selain itu juga dapat memancing amarah para kelompok-kelompok masyarakat yang sudah sering turun ke kantor pemerintahan di kabupaten enrekang guna menyuarakan

aspirasi mereka yang menolak tegas berdiri dan beroperasinya minimarket di Kabupaten Enrekang.

3. Melaksanakan Rencana, diketahui bahwa pencabutan izin operasi pada minimarket indomaret akan secepatnya dilakukan, sebagaimana penyampaian bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang yang disampaikan ulang oleh informan bahwa jika kedapatan tetap beroperasi minimarket tersebut maka akan dikordinasikan oleh Satpol PP yang akan mengeksekusi langsung minimarket tersebut.
4. Melihat Kembali, bahwa hasil dari evaluasi atau melihat kembali dapat diketahui bahwa kebijakan pencabutan izin untuk pendirian minimarket ini sudah sangat tepat, mengingat juga kepentingan masyarakat itu sangat penting.
5. Faktor pendukungnya itu salah satunya masyarakat, masyarakat yang menyuarakan aspirasinya terkait penolakan pendirian minimarket masih berada dalam koridor, dan tidak anarkis hal ini dianggap membantu pihak pemerintah, dan juga dari pihak DPRD Kabupaten Enrekang pula mengancam pembangunan minimarket dengan begini otomatis menjadi salahsatu faktor pendukung pula untuk mencabut izin tersebut.
6. Faktor Penghambatnya yaitu pihak PT. Indomarco kurang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, ini bisa dibuktikan karena mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap mengoperasikan minimarket tersebut.

B. Saran

1. Semoga pemerintah bisa lebih cepat menyelesaikan masalah perlawanan masyarakat ini, dan pemerintah harusnya lebih tegas kepada pihak swasta yang sudah membuat masalah ini berlarut-larut
2. Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih baik duduk bersama dengan pihak-pihak yang terbawah oleh masalah ini guna mencari titik temu untuk kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus (2003). *Korban-korban pembangunan :tilikan terhadap beberapa kasus perusakan lingkungan di tanah air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad EraniYustika .2003. *Negara Vs KaumMiskin*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Erich From,2002. *Marx's Concept of Man Konsep Manusia Menurut Marx, Agung Prihantoro (penerj)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Fajrin M. 2010. *Strategi Perlawanan Masyarakat pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemda, skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fspbi.2005. *PerjuanganMewujudkanPembaharuan Agrarian Sejati*.Jakarta Henry Saragia.
- Kelman, Steven, J. Meyers. 2009. *Successfully Executing Ambitious Strategies In Government: An Empirical Analysis*. Harvard Kennedy School Of Government: Faculty Research Working Paper Series.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, Strategi, Dan Peluang)*. Jakarta. Erlangga.
- Sanderson, Stephen K. 2010. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Kharisma Putra Offset.
- Scott, James. C, 1981. *Moral ekonomi Petani, Pergola kan dan Subsistensi di Asia Tenggara* . Jakarta : LP3ES.
- Suwarsono, 2012. *StrategiPemerintahan: manajemen organisasi publik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2003. *Strategic Management In Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Weber Max 2006 *Etika Protestan & Spirit Kapitalism: sejarah kemunculan dan ramalan tentang perkembangan kultur industrial kontemporer secara menyeluruh*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agrarian: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press, KPA, dan PustakaPelajar. Yogyakarta.

Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalime Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press..

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016.